



STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI



TIMNAS PENCEGAHAN KORUPSI



Konteks



- ▶ Ratifikasi Konvensi anti Korupsi PBB => UU No. 7/2006
- ▶ Perpres 55/2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
- ▶ Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi



SKB 5 K/L

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
5. Kantor Staf Presiden (KSP)



FOKUS

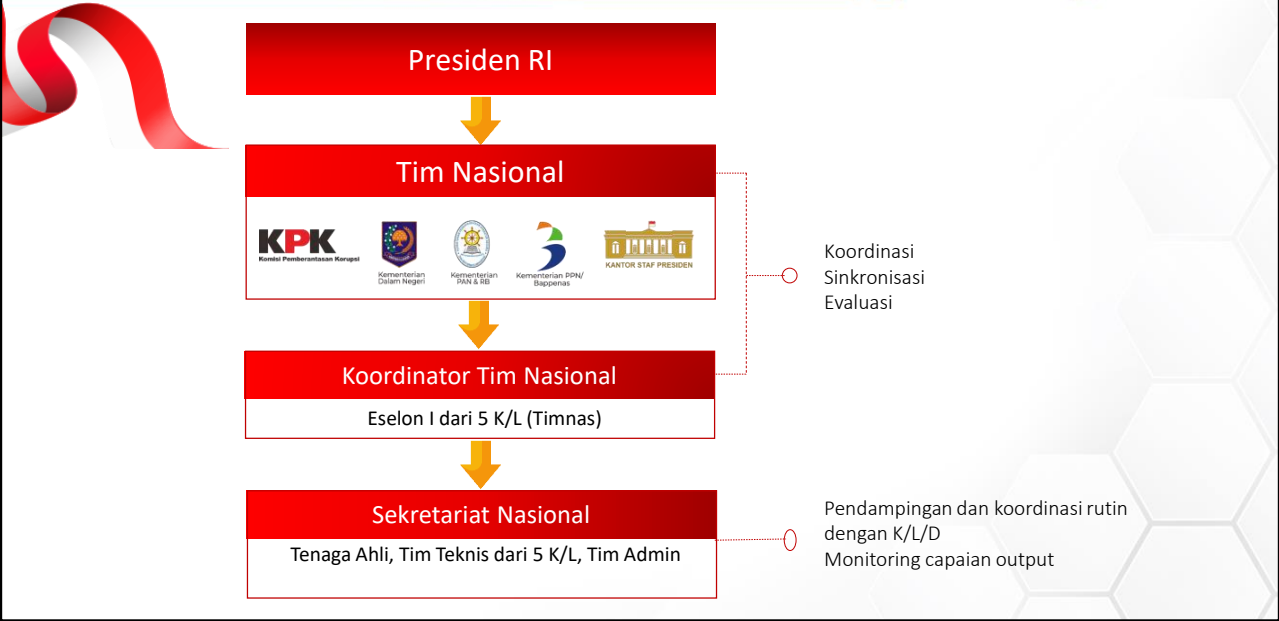


TERUKUR



BERDAMPAK

Struktur Organisasi



STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020



STRUKTUR dan PJ AKSI PK



STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020



FOKUS 1 : PERIZINAN DAN TATA NIAGA



Aksi 1: Peningkatan pelayanan, kepatuhan perizinan dan penanaman modal

1. Penghapusan SKDU-HO
2. Percepatan OSS



Aksi 2: Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, perkebunan dan kehutanan

1. Implementasi one map policy
2. Penetapan kawasan hutan
3. Penguatan & Pemanfaatan basis data benefecial ownership



Aksi 3: Utilisasi Nomor Induk Kependudukan

Utilisasi NIK untuk bantuan sosial



Aksi 4: Pemanfaatan INSW

Integrasi data impor pangan (INSW)



Aksi 5: Manajemen anti Suap

Penerapan sistem manajemen anti suap

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020



FOKUS 2 : KEUANGAN NEGARA



Aksi 6: Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik

Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik



Aksi 7: Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa

- Pembentukan UKPBJ
- Implementasi e-katalog
- Perbaikan sistem Informasi Kinerja Penyedia
- konsolidasi pengadaan
- Sentralisasi pengadaan



Aksi 8: Optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non-pajak

- Reformasi pajak dan PNBP
- Optimalisasi dan perluasan KSWP
- Implementasi BEPS
- Implementasi NDR

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020



FOKUS 3 : PENEGAKAN HUKUM & RB



Aksi 9: Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

- Percepatan sistem merit
- Pembangunan ZI
- Penguatan APIP
- Percepatan pembangunan SPBE



Aksi 10: Implementasi *grand design* strategi pengawasan keuangan desa

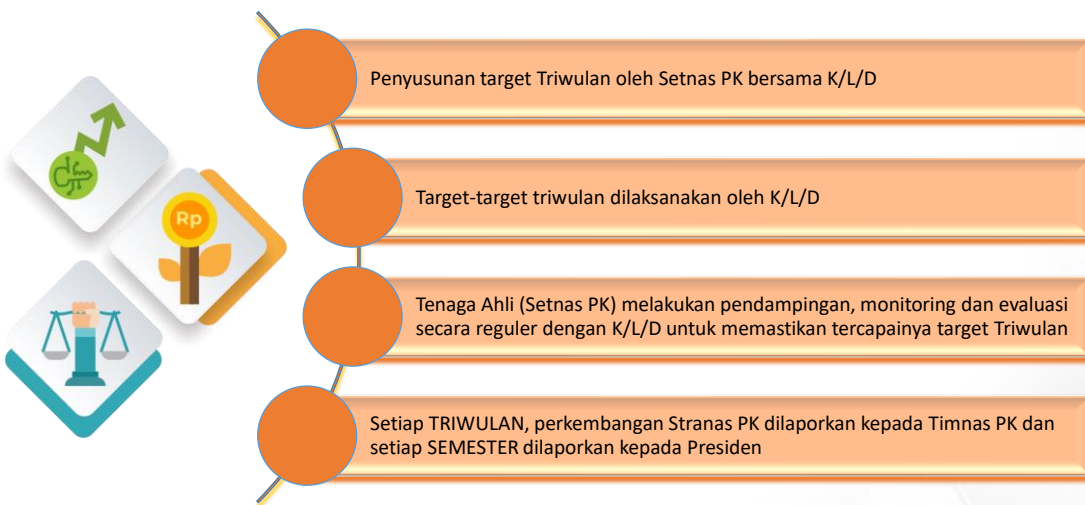
- Implementasi strategi pengawasan keuangan desa



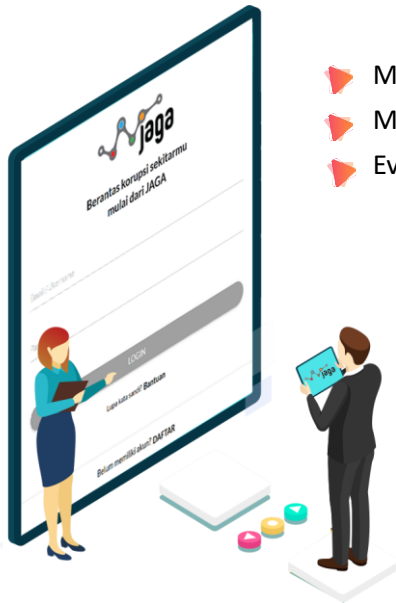
Aksi 11: Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu

- Implementasi SPPT-TI
- Implementasi SPDP online
- Penyusunan pedoman penuntutan

Model Pendampingan dan Monev



Model Pendampingan dan Monev



- ▶ Monitoring reguler melalui sistem aplikasi jaga.id/monitoring
- ▶ Monitoring lapangan untuk verifikasi laporan secara faktual
- ▶ Evaluasi outcome dan impact



Model Pendampingan dan Monev



Pelibatan CSO

- CSO nasional dan lokal terlibat dalam implementasi dan monitoring capaian
- CSO dilibatkan berdasarkan kriteria isu dan pengalaman
- CSO juga memiliki akses ke jaga.id/monitoring.

Strategi Komunikasi

- Pemanfaatan saluran-saluran komunikasi tidak berbayar (media sosial, kanal KPK, kanal media K/L)
- Optimalisasi forum-forum kehumasan K/L
- Publikasi kegiatan-kegiatan Stranas melalui website Stranas PK (<https://stranaspk.kpk.go.id>)
- Diseminasi melalui media elektronik dan cetak (surat kabar, TV, radio)



LAPORAN KEMAJUAN STRANAS PK



- Pelaksanaan rencana aksi sangat tergantung pada komitmen Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D).
- Hingga B09, 5 K/L dan 60 Pemda sama sekali tidak melaksanakan rencana aksi. Sementara itu, 4 K/L menunjukkan implementasi rencana aksi secara konsisten dan sesuai target.
- Ada 12 K/L yang patut diberi apresiasi karena pencapaian aksinya melebihi 70%, yakni Kemenkes, Kementan, KemenPUPR, BIG, PPAK, BPJS Kesehatan, Kemenhub, Kemenag, Kemenristekdikti, BPOM, Kemenaker, Kemendes, Kemenko Polhukam. Sisanya sebanyak 27 K/L lainnya memiliki nilai rerata 50-69%.
- Pada level Pemprov, terdapat 13 provinsi yang capaiannya rendah (di bawah 50%), yakni Aceh, Sumut, Sumbar, Banten, Jateng, NTB, Kalbar, Kalteng, Sultra, Sulteng, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Sementara yang mendapat nilai di atas 70% adalah Kepri, Bengkulu, Jambi, Babel, DKI, Jabar, DIY, Jatim, Bali, NTT, Kaltara, Gorontalo.
- Untuk Pemkab dan Pemkot, ada 100 kabupaten/kota yang nilainya di bawah 50%. 385 kabupaten/kota mencapai nilai di atas 70%. Sisanya sebanyak 57 kabupaten/kota nilainya 50-69%.

Terima Kasih

SEKRETARIAT NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (SETNAS PK)

📍 Gedung Merah Putih KPK
JI Kuningan Persada No.4,
Setiabudi, Jakarta - Indonesia

☎ 021-25578300 ext. 8104

🌐 <https://stranaspk.kpk.go.id>

🌐 <https://jaga.id/monitoring>

